

## ANALISIS FLYPAPER EFFECT DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA DAERAH

Ria Datul Jannah  
riadatul06@gmail.com  
Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research analyzes and examines the effect of flypaper effect at Local-owned Source Revenue (PAD) and Balance Funds (DP), namely General Allocation Funds (DAU), specific Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) on capital expenditure in districts/cities of East Java province during 2021-2023. The research applies quantitatively. Furthermore, the population was local government of district/cities of East Java province and data collection used full sampling. The sample was all districts and cities in East Java Province with 144 data samples. The data were secondary and observed during 2021-2023. Those data were in the form of realization reports of APBD of districts/cities of East Java province 2021-2023 and taken from the official website of [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26 versions. The result concludes that PAD, DAU, DAK and DBH have positive and significant effects on local expenditure, and the flypaper effect happens in the districts/cities of East Java province during 2021-2023*

*Keywords : flypaper effect, Local-owned Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), Specific Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and local expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan pengambilan sampel menggunakan metode *full sampling*. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menghasilkan data sebanyak 114 data. Periode pengamatan sampel yaitu pada tahun 2021-2023 dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Metode analisis pada penelitian menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS Versi 26. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan *Flypaper Effect* terjadi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2021-2023.

Kata Kunci: *flypaper effect*, pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dana bagi hasil (dbh), belanja daerah.

### PENDAHULUAN

Masa Reformasi di Indonesia, yang dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, membawa perubahan signifikan terhadap bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negara Indonesia. Terutama dalam sistem pemerintahan, sistem pemerintahan di Indonesia memasuki fase baru dari sistem pemerintahan sentralis berubah menjadi desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi.

Artinya dapat diketahui bahwa pemerintah pusat memberikan hak dan wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintah dan permasalahan masyarakat setempat secara mandiri. Pemerintah daerah sebagai pemilik hak dan kewenangan atas semua potensi daerah pada era ekonomi daerah memiliki fungsi - fungsi tertentu untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah harus dapat mengelola keuangan daerahnya secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan keuangannya sebaik mungkin. Pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan dana daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang dihasilkan dari pengelolaan sumber ekonomi asli yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peran penting dalam pengeluaran Belanja Daerah karena untuk mendanai kebutuhan belanja yang tinggi maka dibutuhkan sumber pendapatan yang tinggi juga Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi daerah. Dana alokasi khusus (DAK) terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (*based on actual reveue*). Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi fungsi (Halim dan Kusufi,2012:107).

Tingkat belanja daerah yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan pada pendapatan asli daerah saja dalam pendanaan belanja daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut dengan dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil untuk mendanai belanja maka timbulah *Flypaper Effect*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?, (3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?, (4) Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?, (5) Apakah terjadi *Flypaper Effect* yang ditunjukkan melalui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, (2) Menguji pengaruh Dana

Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, (3) Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah, (4) Menguji pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah, (5) Menguji terjadi *Flypaper Effect* atau tidak pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan yaitu DAU, DAK, dan DBH

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Stewardship

Teori stewardship (*Stewardship Theory*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang manajer tidak berfokus pada kepentingan individu, tetapi akan berperilaku sesuai dengan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi dan kejujuran terhadap pihak ketiga (Raharjo, 2007). Menurut Ramadhan (2018) Teori Stewardship dapat diterapkan di organisasi sektor publik. Teori ini mengasumsikan bahwa hubungan yang kuat antara kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berupaya secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintah guna pencapaian tujuan pemerintah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila tujuan ini dapat dicapai rakyat sebagai pemilik akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah. Keterkaitannya dengan penelitian ini dengan teori stewardship adalah pemerintah daerah berperan sebagai *steward* atau penerima amanah dalam mengelola penerimaan daerah dengan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar mencapai kemandirian tanpa bergantung dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berperan sebagai pemeran utama dalam menjalankan manajemen pengelolaan daerah berlaku secara rasional dan keputusan yang diambil tidak didasarkan kepentingan pribadi tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanah, dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan prinsipal

### Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kontribusi berupa dana perimbangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah melalui program pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan APBD memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi. Struktur APBD tersebut terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah.

## **Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tujuan dari belanja daerah yaitu untuk mendanai kebutuhan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bersama.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyatakan bahwa Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi organisasi meliputi belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

## **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah (Mardiasmo, 2013). Tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah

## **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan ditetapkan setiap tahun yang dialokasikan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi tiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Nurchaida (2015:4) mengungkapkan dana alokasi umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sebesar 20% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

## **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terutama dialokasikan untuk pembiayaan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu seperti pendidikan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian dan prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup.

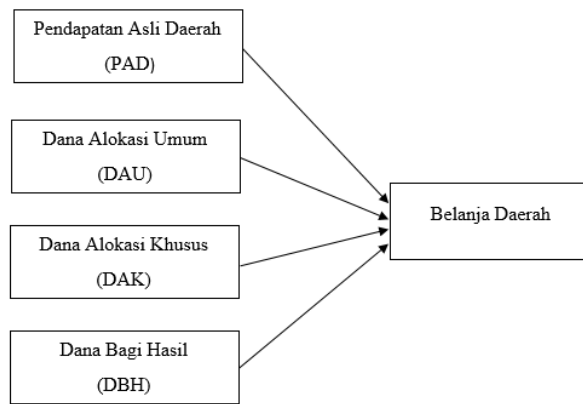
### Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri atas Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu PBB, PPh dan cukai hasil tembakau dan Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi.

### Flypaper Effect

*Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak menggunakan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menimbulkan sebuah pemborosan dalam belanja daerah (Asriati dan Wahidahwati, 2017:134). Hal ini dikarenakan apabila dana transfer yang diperoleh pemerintah daerah berjumlah lebih besar maka periode berikutnya pemerintah daerah akan berusaha mendapatkan jumlah dana transfer yang diterima tetap (Haryani, 2017:134).

### Rerangka Konseptual



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah

PAD menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan stabil maka daerah tersebut memiliki tingkat produktivitas tinggi dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut sehingga semakin tinggi kemampuan pembiayaan daerahnya maka dapat menghasilkan kinerja keuangan yang positif.

Berdasarkan penelitian Rianti dan Kurnia (2020:17) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja daerah**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemertaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang desentralisasi. . Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sehingga dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut kurang mandiri dan menghasilkan kinerja keuangan yang kurang baik.

Berdasarkan penelitian Amalia *et al.*, (2015) menyatakan bahwa dana alokasi umum Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dalam pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja daerah**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus pengeluaran belanja tetapi belanja yang bersifat khusus sesuai dengan prioritas nasional guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Sehingga semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan untuk mendanai kebutuhan khusus sesuai dengan priotas nasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian Armawadin *et al.*, (2017) menyatakan bahwa baik menggunakan model regresi parsial dan berganda Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kota di Sulawesi tahun 2016-2017. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Bagi Hasil secara efektif akan menghasilkan pemerataan kemampuan keuangan dan meningkatkan Belanja Daerah seperti kegiatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima maka semakin tinggi Belanja Daerah.

Berdasarkan penelitian masdjojo dan sukartono (2009) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006-2008. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

### **Analisis flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat terdiri

atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan bertujuan untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. Tetapi, pemerintah daerah terlalu bergantung kepada dan transfer dari pemerintah pusat dalam mendanai belanja daerah yang seharusnya merupakan tugas pemerintah daerah sehingga dapat menimbulkan fenomena *flypaper effect*.

Berdasarkan penelitian dari Inayati dan Setiawan (2017), menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah daerah yang telah dijadikan sebagai sampel. . Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H5: Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (*flypaper effect*).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan kausal komparatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih melalui uji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari dua puluh sembilan kabupaten dan sembilan kota tahun 2021-2023.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *full sampling* yaitu dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel karena terbatasnya jumlah populasi dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari dua puluh sembilan kabupaten dan sembilan kota.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti yaitu berasal dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu menumpulkan dokumen-dokumen khususnya mengenai Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2021-2023 yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana ALokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah.

## **Variabel dan Definisi Operational Variabel**

### **Variabel Independen**

Varibel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan atau pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber ekonomi yang ada di daerahnya sendiri berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi PAD pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun anggran 2021-2023.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah-daerah yang memiliki kapasitas keuangan yang berbeda-beda dalam rangka mendukung desentralisasi fiskal. Data Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi DAU pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2021-2023.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus. Kegiatan khusus ini merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi DAK pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2021-2023.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Data Dana Bagi Hasil dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi DBH pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2021-2023.

### ***Flypaper Effect (FPE)***

*Flypaper Effect* adalah kondisi dimana pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan dana transfer dari pemerintah daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk merespon belanja daerahnya dibandingkan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maimunah (2006) menunjukkan syarat terjadinya *flypaper effect* adalah (a) apabila hasil uji analisis regresi linier berganda menunjukkan efek (nilai koefisien) dana transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah lebih besar daripada efek (nilai koefisien) PAD dan ketiganya sama-sama signifikan, atau (b) PAD tidak signifikan.

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban yang diakui dapat mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data belanja daerah dalam penelitian ini diperoleh dari pos belanja pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2021-2023.

### **Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif**

Sugiono (2017:232) menyatakan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau general. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji nilai residual dalam model regresi apakah berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau data mendekati normal. Pada penelitian ini menggunakan dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan menggunakan pendekatan grafik *Normal Probability (Probability Plot of Regression Standard)* dan uji statistik dengan *Kolmogorov – Smirnov (K-S)*.

Metode analisis grafik *Probability Plots (P-Plots)* digunakan untuk mengetahui normalitas data dengan asumsi jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan metode uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dilakukan untuk mengetahui normalitas data dengan asumsi nilai *Asymp Sig > 0.05*.

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel independen. Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *Tolerance Varians Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance > 0.10* dan nilai *VIF < 10*, maka tidak ada masalah multikolonieritas antar variabel independen.

### Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2018:111). Kriteria dalam pengujian Durbin-Watson yaitu (Suwarjeni, 2016:232): (a) Jika  $0 < d < dL$ , berarti terdapat autokorelasi positif. (b) Jika  $4-dL < d < 4$ , berarti terdapat autokorelasi negative. (c) Jika  $2 < d < 4-dU$  atau  $dU < d < 2$ , berarti tidak terdapat autokorelasi positif atau autokorelasi negative. (d) Jika  $dL \leq d \leq dU$  atau  $4-dU \leq d \leq 4-dL$ , berarti pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat dilakukan uji lain atau menambah data lain. (e) jika nilai  $dU < d < 4-dU$ , berarti tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas menggunakan metode grafik *scatterplot* antara lain prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut: (a) Apabila terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) maka dapat diindikasikan terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika terdapat pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja daerah. Berikut persamaan regresi yang digunakan:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$

Keterangan:

BD : Belanja Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

e : Error

### Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model regresi linier berganda menerapkan variabel dependen dengan nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu dimana ( $R^2$ ) yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan jika nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat signifikan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji kelayakan model menggunakan taraf signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Apabila nilai signifikan uji F > 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak untuk diuji. Tetapi apabila nilai signifikan uji F < 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak untuk diuji.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini paling sering dilakukan dengan menggunakan *significant level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel penelitian. Gambaran tersebut dapat dilihat melalui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan juga nilai standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Pada analisis deskriptif ini akan disajikan gambaran variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH serta variabel dependen penelitian yaitu BD. Berikut hasil analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

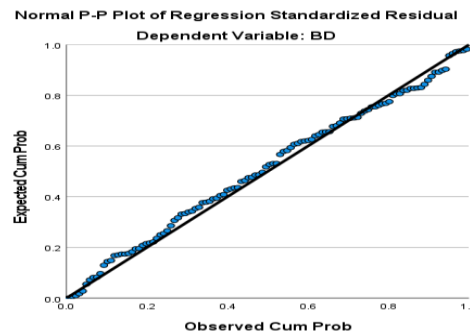
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	.07	.60	.1986	.09436
DAU	114	.13	.47	.3847	.07569
DAK	114	.05	.21	.1363	.03859
DBH	114	.04	.72	.0974	.09362
BD	114	.69	1.18	1.0108	.07177
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 0.07 dan nilai maksimum sebesar 0.60 dengan nilai rata-rata 0.1986 serta standar deviasi 0.09436. Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum 0.13 dan nilai maksimum 0.47 dengan nilai rata-rata 0.3847 serta standar deviasi 0.07569. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 0.05 dan nilai maksimum 0.21, dengan nilai rata-rata variabel ini sebesar 0.1363 dan standar deviasi 0.3859. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar 0.04 dan nilai maksimum 0.72, dengan nilai rata-rata variabel ini sebesar 0.0964 dan standar deviasi 0.09362. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Belanja Daerah (BD) memiliki nilai minimum sebesar 0.69 dan nilai maksimum 1.18, dengan nilai rata-rata variabel ini sebesar 1.0108 dan standar deviasi 0.07177.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Metode analisis grafik Probability Plots (P-Plots) digunakan untuk mengetahui normalitas data dengan asumsi jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berikut ini hasil uji *Probability Plots* (P-Plots):



**Gambar 2**  
**Hasil Grafik Uji Normalitas Menggunakan Grafik Normal P-Plot**  
**Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025**

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis diagonalnya sehingga dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal dan model regresi grafik memenuhi asumsi normalitas.

Metode uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan untuk mengetahui normalitas data dengan asumsi nilai Asymp Sig > 0.05. Berikut ini hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S):Berikut ini hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S):

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov - Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.058115890
Most Extreme Differences	Absolute	.051

	Positive	0.51
	Negative	-.049
Test Statistic		0.51
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>

Sumber : Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2, hasil uji normalitas data menggunakan One - Sample Kolomgorov Smirnov Test dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.200 > 0.05. Maka, model regresi terdistribusi secara normal dan layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF) Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel independen. Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 3**  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.195	5.128
DAU	.240	4.162
DAK	.396	2.524
DBH	.311	3.217

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan tabel 3, hasil tersebut dapat disimpulkan masing - masing variabel memiliki nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen (bebas).

### Uji Autokorelasi

Model regresi dikatakan baik apabila regresi terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson. Berikut ini hasil uji Autokorelasi:

**Tabel 4**  
Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

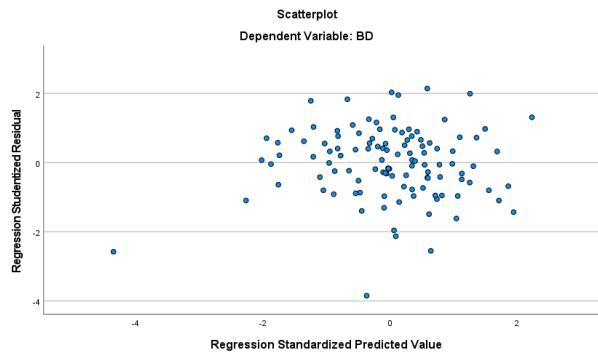
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin-Watson
1	.586 <sup>a</sup>	.343	.319	.05922	2.129

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai d sebesar 2.129 dengan dU sebesar 1.7677 dan 4-dU sebesar 2.2323 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari adanya autokorelasi karena nilai d terletak antara dU sampai 4-dU.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dalam variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila terdapat pola tertentu atau titik-titik membentuk pola teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) maka dapat diindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Apabila terdapat pola yang tidak jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terindikasi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan gambar 3, hasil uji heteroskedastisitas 3 menunjukkan bahwa pola titik-titik menyebar secara acak dan tersebar disekitar angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regresi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD).

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.188	.110		1.076	.091
	PAD	.960	.134	1.623	7.184	.000
	DAU	1.073	.150	1.132	7.147	.000
	DAK	1.152	.229	.619	5.022	.000
	DBH	.634	.107	.827	5.983	.000

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan tabel 5, Bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh sebagai berikut:

$$BD = 0,188 + 0,960 PAD + 1,073 DAU + 1,152 DAK + 0,634 DBH + e$$

Berdasarkan tabel 5, hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6.855 dengan nilai signifikansi 0.000. Maka dapat disimpulkan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  yang berarti model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

**Uji Koefisien Determinasi Berganda (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi diantara nol dan 1 dimana (R<sup>2</sup>) yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan jika nilainya mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi berganda:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin-Watson
1	.586 <sup>a</sup>	.343	.319	.05922	2.129

a. Predictors: (Constan), PAD, DAU, DAK, DBH

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan tabel 6, hasil uji koefisien determinasi berganda menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,343 atau 34,3% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan variabel dependen BD sebesar 34,3%. Sedangkan 65,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan layak atau tidak dalam mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependen . Ketentuan nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**  
**ANNOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	.200	4	.050	14.245	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.382	109	.004		
	Total	.582	113			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH

Sumber : Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan tabel 7, hasil uji kelayakan model (UJI F) menunjukkan nilai F sebesar 14,245 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak untuk digunakan.

**Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap variabel dependen yaitu BD. Syarat dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikan uji hipotesis < 0.05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji hipotesis (uji t).

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Model		Unstandardized		Standardized		Sig.	Keterangan
		Coefficient		Coefficient			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.188	.110			.091	
	PAD	.960	.134	1.623		.000	Diterima
	DAU	1.073	.150	1.132		.000	Diterima
	DAK	1.152	.229	.619		.000	Diterima
	DBH	.634	.107	.827		.000	Diterima

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan tabel 8, hasil uji hipotesis (uji t), maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan sebesar 4.434 dengan signifikansi sebesar 0.000. Maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,960 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah maka hipotesis diterima. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 1,073 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  maka Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah maka hipotesis diterima. Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 1,152 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  maka Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah maka hipotesis diterima. Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,634 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  maka Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah maka hipotesis diterima. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *flypaper effect* menunjukkan bahwa nilai koefisien  $\beta$  DAU sebesar 1,073 dan nilai koefisien  $\beta$  DAK sebesar 1,152 lebih besar dibandingkan nilai koefisien  $\beta$  PAD yang sebesar 0,960 maka telah terjadi *flypaper effect* pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sampai 2023 yang ditunjukkan dengan nilai koefisien  $\beta$  DAU dan DAK lebih besar daripada nilai koefisien  $\beta$  PAD dan ketiganya signifikan maka hipotesis diterima.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah**

Hasil analisis pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkatnya Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan utama

daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik daerah itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rianti dan Kurnia (2020:17), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Daerahnya.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah**

Hasil analisis pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah karena adanya keterbatasan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki sehingga tidak semua Belanja Daerah dapat dibiayai menggunakan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amalia *et al.* (2015), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat juga Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah**

Hasil analisis pengujian hipotesis yang dilakukan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk tujuan tertentu yang bersifat spesifik sesuai dengan peruntukannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Armawadin *et al.* (2017), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat juga Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah**

Hasil analisis pengujian hipotesis yang dilakukan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Dana Bagi Hasil adalah salah satu pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi pajak dan hasil sumber daya alam daerah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga Dana Bagi Hasil dapat dijadikan sebagai tambahan pendapatan dalam memenuhi Belanja Daerah untuk digunakan mendanai program-program pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat juga Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### **Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan**

Hasil analisis pengujian hipotesis yang dilakukan hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang menyatakan bahwa pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (*flypaper effect*) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil maka akan meningkatkan jumlah Belanja Daerah sehingga terjadi *flypaper effect*. berjalan tanpa mengandalkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan masih terjadinya *Flypaper Effect* membuktikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat masih ikut andil di dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tidak selaras dengan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian. Berdasarkan data penerimaan dana perimbangan yaitu DAK, DAU dan DBH yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2023 dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan belum cukup mandiri kecuali Kota Surabaya. Dengan disahkannya UU No 1 Tahun 2022 dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah dengan mendorong daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD sehingga tidak bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis *Flypaper Effect* dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2021-2023, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka pemerintah daerah memiliki banyak dana untuk dapat dialokasikan di berbagai sektor pembangunan sehingga Belanja Daerah akan meningkat, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat dikarenakan adanya keterbatasan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki untuk membiayai Belanja Daerah seperti belanja pegawai, (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat dikarenakan Pembangunan-pembangunan yang membutuhkan anggaran yang besar dan bersifat skala nasional seperti pembangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit dan bantuan operasional pendidikan, (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat dikarenakan Dana Bagi Hasil dapat menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, (5) terjadi *Flypaper effect* di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2021-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus lebih besar daripada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah dan ketiganya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat maka akan meningkatkan Belanja Daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa pemerintah daerah masih

bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Belanja Daerahnya karena adanya keterbatasan Pendapatan Asli Daerah dan Dana transfer yang bersifat lebih stabil sehingga dapat lebih diandalkan.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun beberapa keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun yaitu pada tahun 2021-2023 sehingga hasil penelitian ini tidak mewakili secara umum daerah selain Provinsi Jawa timur, (2) Penelitian ini hanya menganalisis beberapa variabel yang terkait dengan dengan *Flypaper Effect* terutama aspek fiskal, sehingga tidak dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi fenomena.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas maka saran yang dapat dikemukakan yaitu: (1) Menggunakan pendekatan lain seperti wawancara, (2) Mempertimbangkan fakto-faktor lain seperti faktor politik dan faktor sosial, (3) Perpanjangan periode penelitian

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. 2015. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 11, No.1, hlm 15-25.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65368/1/ANALISIS%20FLYPAPER%20EFFECT%20PADA%20BELANJA%20DAERAH%20KABUPATEN%20DN.pdf>
- Apriliawati, K. N., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).  
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1558>
- Armawaddin, M., W. A. Rumbia, dan M. N. Afiat. 2017. Analisis *Flypaper Effect* Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 18(1): 77- 91.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol18/iss1/5/>
- Asriati, D. dan Wahidahwati. 2017. *Flypaper Effect* pada DAU DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(10).  
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1690>
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryani. 2017. Analisis *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18(2): 133-140.  
<https://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/401>
- Inayati, N. I. dan D. Setiawan. 2017. Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1(2): 220-239  
<https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2062>
- Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

- Masdjojo, G. A. dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen* 6(1): 32-50.  
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe5/article/download/2070/738>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/117485/Permen-No.13-2006.pdf>
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* , 2 (1).  
<https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/22>
- Ramadhan, P. N. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.  
<https://repository.ump.ac.id/9143/>
- Rianti, I. D. A. dan Kurnia. 2020. Flypaper Effect Pada DAU DAK PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(5).  
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2885>
- Sugiono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/30506/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202004.pdf>
- \_\_\_\_\_. Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202004.pdf>